

2024



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BELITUNG**

# LAPORAN

## **KINERJA TAHUNAN INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024**



**Badan Kesbangpol Kab. Belitung**  
Jalan Anwar Nomor 03 Kecamatan Tanjungpandan

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dilaporkan dalam laporan ini merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan staf dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, segenap jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung melalui capaian-capaian tahunan. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung atas dukungan dan kerja kerasnya sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Diharapkan apa yang telah dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semoga penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang dan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung semakin meningkat ditahun 2025 dan tahun-tahun

mendatang, sehingga amanah nasional yang kita emban sebagai pelayan publik, dapat kita pertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat, bangsa dan negara maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tanjungpandan, Januari 2025  
Kepala Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Belitung

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG". The inner part of the stamp contains the text "BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name and title of the official are printed in black text.

Fedy Malonda, S.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196910041998031008

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	3
1.1 Tugas dan Fungsi .....	3
1.2 Struktur Organisasi .....	5
1.3 Aspek Startegis Organisasi .....	15
1.4 Sistematika Laporan .....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	18
2.1 Target Kinerja Tahun 2024-2026 .....	18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	22
3.1.1 Ringkasan Kinerja .....	22
3.2. Kinerja Lainnya .....	28
3.2.1 Kinerja Lainnya .....	28
3.2.2 Penghargaan .....	28
3.2.3 Perbaikan SAKIP pada Tahun 2024 .....	28
3.3 AKuntabilitas Keuangan .....	29
BAB IV PENUTUP .....	65
4.1 Kesimpulan Kinerja Tahun 2024 .....	65
4.2 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025 .....	66
LAMPIRAN	

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran : Terwujudnya Ketentraman, Keamanan dan Stabilitas Politik yang Kondusif dengan indikatornya presentase meningkatnya penanganan konflik dengan capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2024 dari target 100% terealisasi 100%.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan tercapainya Indikator Program, yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan indikator persentase pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan dari target 100% tercapai 100% dari target.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik pada indikator pertama yaitu persentase partisipasi politik masyarakat Kabupaten Belitung dalam Pilkada/Pileg/Pilpres dari target 100% tercapai 100%. Sedangkan pada indikator kedua yaitu Persentase lembaga yang mendapatkan pendidikan politik dari target 100% tercapai 100% dari target.
3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya pada indikator pertama yaitu persentase pembentukan Satgas Anti NAPZA dari target 100% tercapai 100% dari target. Sedangkan pada indikator kedua yaitu persentase penanganan konflik berbasis ekonomi, sosial dan budaya dari target 100% tercapai 100% dari target.

4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dari target 100% tercapai 100% dari target.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung ke depan, sebagai berikut:

- a. Keadaan masyarakat Kabupaten Belitung yang heterogen sehingga dapat menjadi salah satu pemicu munculnya gesekan sosial;
- b. Masih adanya peredaran gelap Narkoba di Kabupaten Belitung yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan pencegahan dini;
- c. Masih adanya masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu karena kurangnya pemahaman tentang politik dan demokrasi;
- d. Masih adanya organisasi kemasyarakatan yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar;
- e. Masih maraknya kenakalan remaja yang mengancam keselamatan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Belitung;
- f. Mempertahankan Kabupaten Belitung sebagai Kabupaten dengan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (*The City Of Tolerance*).

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Tugas dan Fungsi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Perumusan, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pengkoordinasian, pengumpulan data, analisis data dan informasi organisasi kemasyarakatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitoring, sosialisasi dan publikasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Belitung; dan
- g. Pelaksanaan kewenangan lain yang diberikan oleh Bupati.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan komunikasi, konsultasi, koordinasi dan fasilitasi dalam rangka terselenggaranya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahananekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Belitung;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## 1.2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Kabupaten Belitung terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;

- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian tugas dan fungsi struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung adalah :

#### **A. Kepala Badan**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung dipimpin oleh Kepala Badan, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, menyusun dan melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Belitung;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **B. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan pengelolaan data dan informasi, penyusunan laporan kinerja, melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, penataan barang milik Daerah serta pengelolaan kepegawaian.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian program, umum dan kepegawaian;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program di setiap Bidang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. penyusunan laporan kinerja pelaksanaan program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. penyelenggaraan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga dan penataan barang milik Daerah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha pimpinan, hubungan masyarakat, protokoler di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan kegiatan umum dan kepegawaian;

- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama**

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;

- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;

- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di daerah;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **E. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik social di daerah serta pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Belitung. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Belitung;

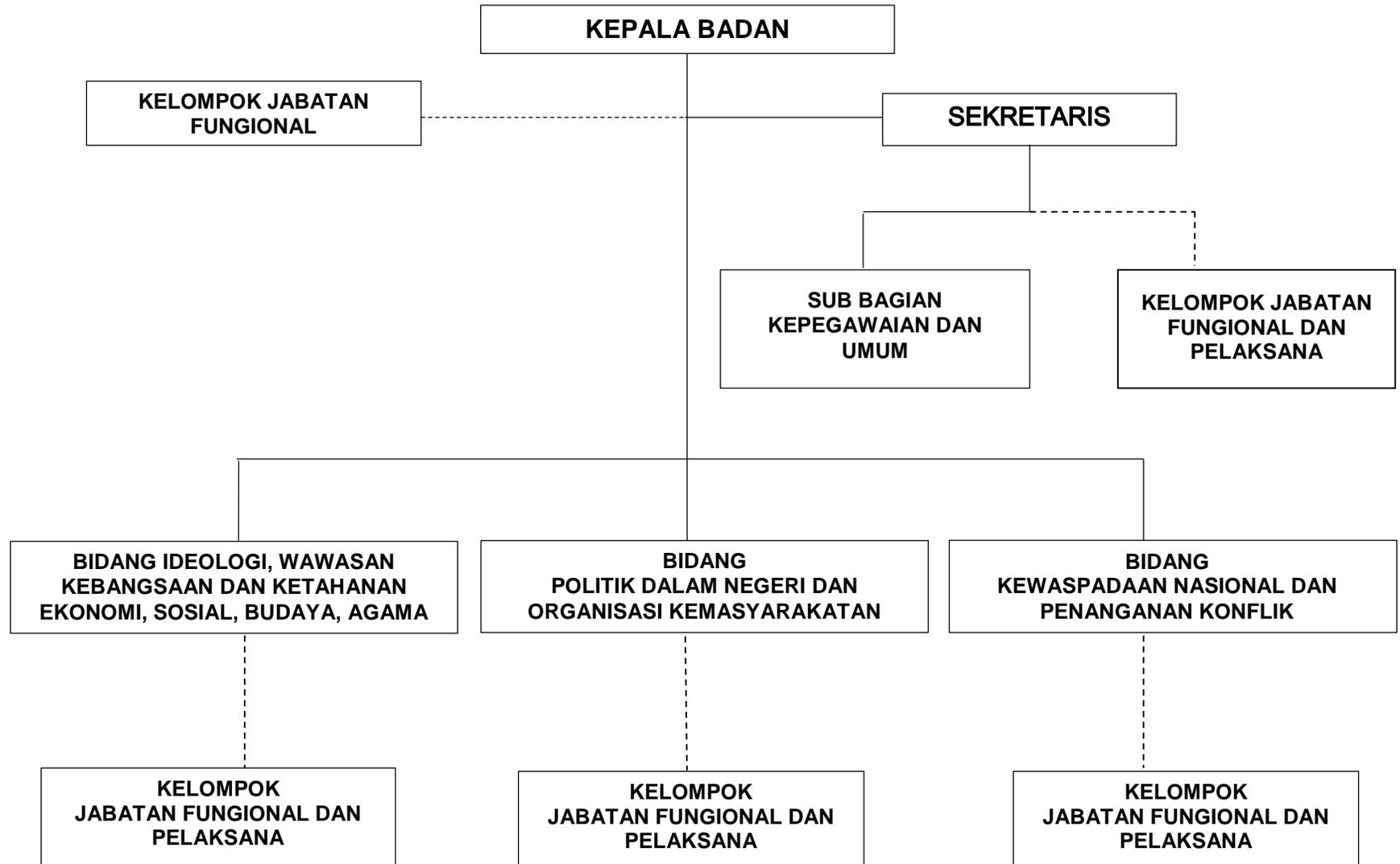
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **F. Kelompok jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
3. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG



Terhitung per 1 Desember 2024, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung seluruhnya adalah sebanyak 20 (Dua Puluh) ASN dan 3 (Tiga) tenaga Non PNS dengan komposisi dilihat dari aspek kelembagaan sebagai berikut:

**Tabel 1.2.2**  
**Komposisi dan Jumlah ASN**

NO.	J a b a t a n	PNS Berdasarkan Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Badan				1	1
2.	Sekretariat		2	6	1	9
3.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama			2	1	3
4.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan			3	1	4
5.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik			2	1	3
<b>J U M L A H</b>			<b>2</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>20</b>

**Tabel 1.2.3**  
**Komposisi dan Jumlah Tenaga Non PNS**

No.	URAIAN	Jumlah
1.	Tenaga Administrasi Perkantoran	1
2.	Tenaga Kebersihan	1
3.	Tenaga Keamanan	1
Jumlah		<b>3</b>

### 1.3. Aspek Strategis Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*), yaitu sebagai berikut:

1. Manajemen sumber daya manusia yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi;

2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Kesatuan Bangsa dan Politik yang perlu diperhatikan, khususnya pada tindak lanjut evaluasi. Evaluasi yang dilakukan pertigabulan dan tahunan penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan faktor penghambat kegiatan/program serta untuk perbaikan kegiatan/program mendatang;
3. Kurangnya konsistensi dan komitmen dari perangkat daerah dalam penyelesaian proses perencanaan (pengumpulan data dan laporan) secara tepat waktu;
4. Belum adanya sistem pengelolaan *knowledge* yang dapat menghimpun seluruh produk Kesbangpol secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan, implikasi lebih jauhnya kemungkinan duplikasi kajian atau dokumen perencanaan menjadi lebih besar; dan
5. Belum adanya regulasi penyelenggaraan sistem inovasi daerah berupa peraturanmaupunpetunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis (juknis).

#### 1.4. Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Laporan ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung selama tahun 2024. Pencapaian kinerja tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan rencana kerja tahunan tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Berdasarkan pola pikir tersebut, maka sistematika Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

## **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

## **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan dilakukan analisis capaian kinerja dimaksud.

### **B. Akuntabilitas Keuangan**

Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## **BAB IV. PENUTUP**

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan Instansi Pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah SKPD serta menilai keberhasilan organisasi. Perencanaan dan perjanjian kinerja tidak dapat dipisahkan dari Rencana Strategis karena sesungguhnya merupakan penjabaran tahunan dari Renstra itu sendiri.

### 2.1. Target Kinerja Tahun 2024-2026

Pencapaian indikator kinerja perangkat daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Belitung unsur penunjang urusan perencanaan tahun 2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	
				2023	2024
1.	Terwujudnya Ketentraman, Keamanan dan Stabilitas Politik yang Kondusif	Persentase Penanganan Konflik	persen	100	100
1.1	Meningkatnya Ketentraman, Keamanan dan Stabilitas Politik	Persentase Penanganan Konflik	persen	100	100

Adapun penjelasan terkait capaian indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penanganan Konflik} = \frac{\text{Jumlah konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah konflik yang ada pada tahun n}} \times 100\%$$

1. Persentase Meningkatnya Penanganan Konflik Tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini dikarenakan penyelesaian permasalahan konflik telah difasilitasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yang bekerjasama dengan OPD ataupun instansi vertikal terkait sesuai data dan pelaporan penanganan konflik pada Tahun 2024 dapat diselesaikan di mulai dari tingkat yang paling rendah.
2. Persentase Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Kebangsaan Tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pemahaman terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan yang melibatkan masyarakat dan pelajar telah dilaksanakan.

**Tabel 2.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III**

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Satuan	Target Kinerja	
			2023	2024
1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi dan keuangan sesuai ketentuan	Persen	100	100
2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Persen	75	75
3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persen	100	100
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100
5	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100
6	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Persen	100	100
7	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100
8	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	Persen	100	100

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung terdapat kesepakatan atau perjanjian kinerja antara Bupati Belitung selaku Kepala Daerah dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung untuk melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Perubahan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Berikut dapat kita lihat perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung tahun 2024 dapat dilihat pada table 2.2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1**  
**Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2024**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>1</b>	<b>Terwujudnya ketentraman, keamanan dan stabilitas politik yang kondusif</b>	<b>Persentase penanganan konflik</b>	100
1.1	Meningkatnya ketentraman, keamanan dan Stabilitas Politik	Persentase penanganan konflik	100

Secara lebih terukur dan terarah Rencana Kinerja yang dituangkan dalam program dan kegiatan pada rencana Kerja Tahunan untuk Tahun 2024. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian indikator kinerja dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten Belitung, berikut disampaikan dukungan PAPDB

yang dianggarkan pada Anggaran Belanja Langsung pada Pelaksanaan Program Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada table 2.2.2 berikut:

**Tabel 2.2.2 Jumlah Anggaran Belanja Langsung  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>		<b>Keterangan</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	<b>5.210.764.860</b>	<i>P-APBD</i>
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp	<b>1.294.411.300</b>	<i>P-APBD</i>
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	<b>24.138.045.300</b>	<i>P-APBD</i>
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp	<b>591.050.000</b>	<i>P-APBD</i>
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp	<b>1.224.715.000</b>	<i>P-APBD</i>
	<b>Total Anggaran</b>	Rp	<b>32.458.986.460</b>	

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan, perencanaan strategis suatu organisasi.

#### 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

##### 3.1.1 Ringkasan Kinerja

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan dilakukan dengan evaluasi kinerja yang ditentukan dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja, yaitu:

**Tabel 3.1.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**  
**Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017**

InterVAL Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
76 % ≤ 90 %	Tinggi
66 % ≤ 75 %	Sedang
51 % ≤ 65 %	Rendah
≤ 50 %	Sangat Rendah

Aspek masukan terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu dana, sarana prasarana dan aspek sumber daya manusia, sedangkan dalam proses pencapaian keluarannya belum dikaji melalui aspek ekonomis dan efektifitas, sehingga nilai capaian baru dari segi keuangan saja. Adapun anggaran keuangan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Belitung berasal dari APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Tahun 2024 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dengan realisasinya.

Untuk dapat mengetahui capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung, maka akan dilakukan evaluasi terhadap 4 capaian kinerja yaitu (1). Kinerja Tujuan Perangkat Daerah, (2). Kinerja Sasaran Perangkat Daerah, (3). Kinerja Program Perangkat Daerah, dan (4). Kinerja Keuangan dan Fisik yang dilakukan membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Keempat hal tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2**  
**Presentase Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Tahun 2024 per 31 Desember 2024**

No	Program	Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Anggaran	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.210.764.860	100	4.600.006.759	87,12
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter	1.294.411.300	100	1.188.686.101	91,83
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	24.138.045.300	100	24.050.812.998	96,06
4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	591.050.000	100	450.532.562	76,22
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Program Peningkatan Kewaspadaan	1.224.715.000	100	999.072.115	81,57
S	Jumlah	32.458.986.460	100	31.289.110.535	96,40

secara keseluruhan termasuk belanja tak langsung, serapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 31.289.110.535,00 dari anggaran Rp. 32.458.986.460,00 atau 96.40% untuk capaian keuangan. Perbaikan kinerja dalam hal Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik yang dialami oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari tahun ke tahun membawa pengaruh terhadap Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

Untuk melihat sampai sejauhmana pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja kegiatan. Atas dasar hasil-hasil yang telah diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja sasaran, melalui indicator - indicator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas serta dapat juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran Capaian kinerja masing-masing indicator kinerja kegiatan pada setiap sasaran kegiatan.

**Tabel 3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja
				2024	2024
1	Terwujudnya ketentraman, keamanan dan stabilitas politik yang kondusif	Persentase penanganan konflik	persen	100	100
1.1.	Meningkatnya ketentraman, keamanan dan Stabilitas Politik	Persentase penanganan konflik	persen	100	100

### 3.1.2 Uraian Kinerja

#### 1.1 Sasaran Strategis Meningkatnya ketentraman, keamanan dan Stabilitas Politik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya ketentraman, keamanan dan Stabilitas Politik	Persentase Penanganan Konflik	<p>(Jumlah konflik yang ditangani / Jumlah Konflik yang ada pada tahun n) x 100%</p> $\frac{3}{3} \times 100\% = 100$	Laporan Penanganan konflik Sosial (PKS)

Persentase Meningkatnya Penanganan Konflik Tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini di karenakan penyelesaian permasalahan konflik telah di fasilitasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yang bekerjasama dengan OPD ataupun instansi vertikal terkait sesuai data dan pelaporan penanganan konflik pada Tahun 2024 dapat di selesaikan di mulai dari tingkat yang paling rendah.

Tabel 3.1.4  
Capaian Indikator Kinerja Program/Eselon III

No	Indikator Kinerja Program/Eselon III	Satuan	Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
			2023	2024	2023	2024
1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi dan keuangan sesuai ketentun	Persen	100	100	100	100
2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Persen	75	75	75	85.6
3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100

4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100	100	100	100
5	Persentase Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	100	100	100
6	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Persen	100	100	100	99,87
7	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	100	100	100	81,85
8	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	Persen	100	100	100	92,87

Capaian Indikator Kinerja Program Unsur Penunjang Urusan Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Persentase (%) Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100%. Adapun faktor pendukung adalah telah terealisasi seluruh Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.
2. Persentase (%) Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah sebesar 75% naik dari target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 85,6%. Adapun faktor pendukung adalah sebagian besar pegawai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan intelijen dan pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan tupoksi Badan Kesbangpol sehingga ada penyesuaian bobot dimensi indeks profesionalitas ASN.
3. Persentase (%) Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100%.

Adapun faktor pendukung adalah telah terealisasi seluruh kegiatan rutin yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.

4. Persentase (%) pemenuhan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100%. Adapun faktor pendukung adalah telah terealisasi seluruh urusan kegiatan rutin yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.
5. Persentase (%) Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Peningkatan Wawasan Kebangsaan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 100%. Adapun faktor pendukung adalah secara keseluruhan seluruh rangkaian kegiatan wawasan kebangsaan yang melibatkan masyarakat dan pelajar telah dilaksanakan.
6. Persentase (%) Parpol dan Lembaga Pendidikan Politik yang Mendapatkan Pendidikan Politik sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 98,7%. Adapun faktor pendukung adalah seluruh kegiatan baik pendidikan politik dan bimtek parpol bagi pengurus parpol serta berkas pencairan bantuan hibah parpol, hibah KPU, dan Hibah kepada Bawaslu telah dilaksanakan dengan tepat waktu.
7. Persentase (%) Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 81,85%. Adapun faktor pendukung adalah secara keseluruhan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan Penanganan Masalah Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya telah dilaksanakan.
8. Persentase (%) Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 92,87%. Adapun faktor pendukung adalah seluruh pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya sehingga tingkat penanganan konflik yang ada di masyarakat telah diatasi di Tahun 2024 dengan adanya kerjasama dengan forkopimda dan tim intelijen instansi vertikal.

## 3.2 Kinerja lainnya

### 3.2.1 Kinerja Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung tidak memiliki kinerja lain disamping yang tercantum dalam perjanjian kinerja.

### 3.2.2 Penghargaan

Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung meraih penghargaan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Piagam Penghargaan atas Komitmen dan Kerjasama dalam mewujudkan Provinsi Bersih dari Narkoba.

Tabel 3.2.2 Penghargaan Yang Diraih Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Perangkat Daerah Penerima Penghargaan
1	P4GN Award 2024 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung



### 3.2.3. Perbaikan SAKIP pada Tahun 2024

Menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, adapun perbaikan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sudah dilakukan penyelarasan Dokumen Perubahan Renstra dan Dokumen Perubahan RPJMD sesuai dengan ketentuan yang ada.

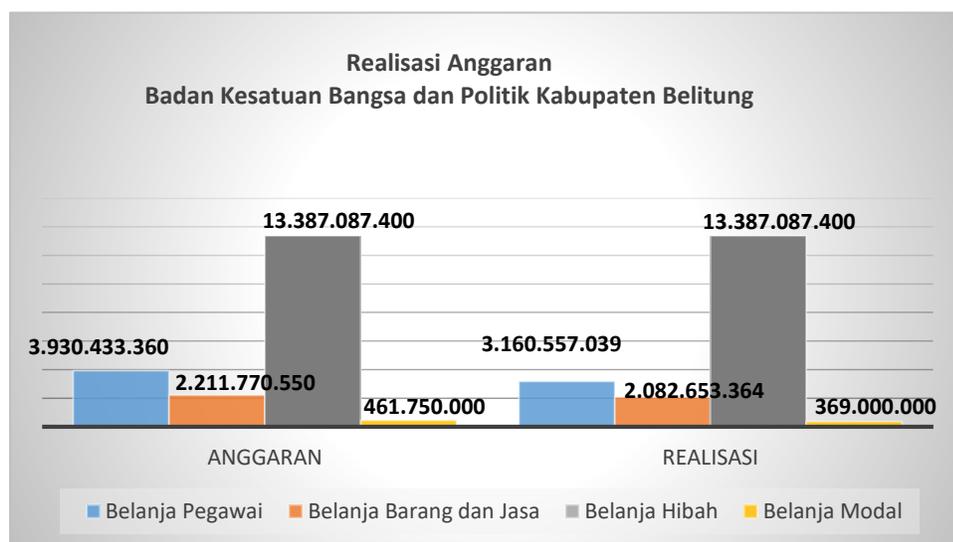
- Perubahan pada target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan telah diselaraskan dengan sasaran dan indikator kinerja sasaran yang terdapat dalam perubahan Renstra dan didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar Rp. 31.289.110.535,- atau terserap 96,40% dari Total Anggaran Rp. 32.430.236.460,-. Rincian per jenis belanja dan per program dapat dilihat pada tabel 3.3.1.

**Tabel 3.3.1**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024 menurut Jenis Belanja**

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	3.923.482.860	3.462.119.781	88,24
2	Belanja Barang dan Jasa	4.290.203.000	3.674.440.154	94.16
3	Belanja Modal	461.750.000	369.000.000	88,65
4	Belanja Hibah	23.783.550.600	23.783.550.600	100
<b>Jumlah</b>		<b>32.430.236.460</b>	<b>31.289.110.535</b>	<b>96,40</b>



Tabel 3.3.2

Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2024 menurut program/kegiatan

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<b>Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan keuangan sesuai ketentuan 2. Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah 3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah 4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
	Anggaran		-	100	4.315.314.060	5.210.764.860
	Realisasi		-	92,8	3.535.324.794	4.600.006.759
	%		-	100	89,54	91,83
	<b>Kegiatan :</b> <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<i>Output :</i> Dokumen hasil perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah <i>Outcome :</i> Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan				
	Anggaran		-	10 Dok	0	13.953.700
	Realisasi		-	9 Dok	0	5.233.200
	%		-	100	0	37,50
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		-	3 Dok	0	2.493.500
	Realisasi		-	3 Dok	0	2.283.400
	%		-	100	0	91,57
	2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
	Anggaran		-	1 Dok	0	1.937.000
	Realisasi		-	1 Dok	0	1.541.800
	%		-	100	0	79,59
	3.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD				
	Anggaran		-	1 Dok	0	2.987.000
	Realisasi		-	1 Dok	0	0
	%		-	100	0	0
	4.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
	Anggaran		-	1 Dok	0	2.996.700
	Realisasi		-	1 Dok	0	0
	%		-	100	0	0
	5.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				
	Anggaran		-	3 Lap	0	3.539.500
	Realisasi		-	3 Lap	0	1.408.000
	%		-	0	0	39,77
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<i>Output</i> : Dokumen keuangan perangkat daerah <i>Outcome</i> : Terpenuhinya dokumen sesuai				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		peraturan				
	Anggaran		22 OB	3 Dok	3.930.433.360	3.928.482.860
	Realisasi		22 OB	3 Dok	3.160.557.039	3.467.007.081
	%		100	100	80,41	88,25
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				
	Anggaran		22 OB	21 OB	3.930.433.360	3.923.482.860
	Realisasi		22 OB	21 OB	3.160.557.039	3.462.119.781
	%		100	100	80,41	88,24
	1.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					
	Anggaran		22 OB	1 Lap	0	2.000.000
	Realisasi		22 OB	1 Lap	0	1.954.000
	%		100	100	0	97,7
	2.Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	Anggaran		22 OB	2 Dok	0	3.000.000
	Realisasi		22 OB	2 Dok	0	2.933.300
	%		100	100	0	97,7
	<b>Kegiatan :</b> <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<i>Output</i> : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah <i>Outcome</i> : Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah				
	Anggaran		-	100	0	140.500.000
	Realisasi		-	100	0	82.966.221
	%		-	100	0	59,05
	<b>Sub kegiatan :</b> 1.Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		-	1 Paket	0	10.500.000
	Realisasi		-	1 Paket	0	10.000.000
	%		-	100	0	95,23
	2.Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tusi	jumlah pegawai yang mengikuti tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				
	Anggaran		-	15 Orang	0	130.000.000
	Realisasi		-	7 Orang	0	72.966.221
	%		-	46,67	0	56,12
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Output</i> : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah  <i>Outcome</i> :terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah				
	Anggaran		100	100	193.750.700	363.573.300
	Realisasi		100	100	181.845.513	342.218.168
	%		100	100	93,85	94,12
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1.Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				
	Anggaran		1 Paket	1 Paket	2.000.000	5.000.000
	Realisasi		1 Paket	1 Paket	2.000.000	5.000.000
	%		100	100	100	100
	2.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				
	Anggaran		2 Paket	2 Paket	40.712.800	49.994.800

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Realisasi		2 Paket	2 Paket	36.485.000	49.645.800
	%		100	100	89,62	99,30
	3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				
	Anggaran		-	1 Paket	0	7.000.000
	Realisasi		-	1 Paket	0	4.901.500
	%		-	100	0	70,02
	4.Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				
	Anggaran		2 Paket	2 Paket	38.826.500	69.211.400
	Realisasi		2 Paket	2 Paket	38.695.374	69.037.714
	%		100	100	99,66	99,74
	5.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				
	Anggaran		1 Paket	1 Paket	22.211.400	25.000.000
	Realisasi		1 Paket	1 Paket	15.415.000	18.458.800
	%		100	100	69,40	73,83
	6.Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan				
	Anggaran		-	1 Dok	0	7.000.000
	Realisasi		-	1 Dok	0	4.300.000
	%		-	100	0	61,42
	7.Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyeleggaraan rakor dan Konsultasi SKPD				
	Anggaran		12 Lap	12 Lap	90.000.000	200.367.500

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Realisasi		12 Lap	12 Lap	89.250.139	190.874.354
	%		100	100	99,17	95,26
	<b>Kegiatan :</b> <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<i>Output</i> : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur <i>Outcome</i> : Jenis Barang Milik Daerah				
	Anggaran		-	2 Jenis	-	416.250.000
	Realisasi		-	1 Jenis	-	369.000.000
	%		-	100	-	88,64
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Anggaran		-	2 Jenis	-	416.250.000
	Realisasi		-	1 Jenis	-	369.000.000
	%		-	100	-	88,64
	<b>Kegiatan :</b> <b>Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<i>Output</i> : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah <i>Outcome</i> : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				
	Anggaran		12 Lap	100	155.000.000	158.499.600
	Realisasi		12 Lap	100	136.234.642	148.062.169
	%		100	100	87,89	93,41
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1.Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat				
	Anggaran		-	12 Lap	0	2.500.000
	Realisasi		-	12 Lap	0	2.500.000
	%		-	100	0	100
	2.Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		yang disediakan				
	Anggaran		12 Lap	12 Lap	56.000.000	56.000.000
	Realisasi		12 Lap	12 Lap	37.234.642	45.562.769
	%		100	100	66,49	81,36
	3.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				
	Anggaran		12 Lap	12 Lap	99.000.000	999.999.600
	Realisasi		12 Lap	12 Lap	99.000.000	999.999.400
	%		100	100	100	99,99
	<b>Kegiatan :</b> <b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<i>Ouput</i> :Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur  <i>Outcome</i> : Barang milik daerah dalam kondisi baik				
	Anggaran		11 Unit	4 Jenis	36.130.000	189.505.000
	Realisasi		11 Unit	4 Jenis	28.343.800	185.519.920
	%		100	100	78,45	97,89
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					
	Anggaran		11 Unit	10 Unit	72.750.000	61.250.000
	Realisasi		11 Unit	10 Unit	64.658.790	58.732.750
	%		100	100	88,87	95,89
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak perorangan dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		-	2 Unit	-	18.000.000
	Realisasi		-	1 Unit	-	16.645.000
	%		-	100	-	99,99
	3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				
	Anggaran		-	49 Unit	0	40.255.000
	Realisasi		-	12 Unit	0	40.160.000
	%		-	92,31	0	99.76
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				
	Anggaran		-	4 Unit	0	70.000.000
	Realisasi		-	4 Unit	0	69.982.170
	%		-	100	0	99,97
2.	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan				
	Anggaran		3 Dok		759.162.400	
	Realisasi		3 Dok		704.144.903	
	%		100		92,75	
	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa</b>	<i>Output :</i> Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan  <i>Outcome :</i> Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		kebangsaan				
	Anggaran		1 Dok	3 Dok	759.162.400	1.294.411.300
	Realisasi		1 Dok	3 Dok	704.144.903	1.188.686.101
	%		100	100	92,75	91,83
	<b>Sub Kegiatan :</b>	Jumlah orang yang mengikuti				
	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan				
	Anggaran		-	75 Orang	0	1.185.303.300
	Realisasi		-	75 Orang	0	1.105.186.101
	%		-	100	0	93,24
	2. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan				
	Anggaran		40 Orang	300 Orang	759.162.400	109.108.000
	Realisasi		40 Orang	300 Orang	704.144.903	83.500.000
	%		100	100	92,75	76,52
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</b>	Parpol dan lembaga pendidikan politik yang mendapatkan pendidikan politik				
	Anggaran		3 Dok	100	13.527.721.350	24.138.045.300
	Realisasi		3 Dok	100	13.512.473.676	23.828.769.350

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	%		100	100	99,88	98,71
	<b>Kegiatan :</b> <b>Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan parpol, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan Situasi Politik</b>	<i>Ouput :</i> Meningkatnya pemahaman politik parpol dan lembaga pendidikan  <i>Outcome :</i> Laporan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan parpol, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan Situasi Politik				
	Anggaran		3 Dok	100	13.527.721.350	24.138.045.300
	Realisasi		3 Dok	100	13.512.473.676	23.828.769.350
	%		100	100	99,88	98,71
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1.penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah kebijakan di bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik				
	Anggaran		13 Dok	12 Dok	13.420.087.400	23.836.550.300
	Realisasi		13 Dok	12 Dok	13.420.087.400	23.770.869.350
	%		100	100	100	99,72

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik				
	Anggaran		50 Orang	210 Orang	59.958.250	60.000.000
	Realisasi		50 Orang	210 Orang	58.382.021	57.900.000
	%		100	100	97,37	96,5
	3.Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik				
	Anggaran		2 Lap	4 Lap	47.675.700	241.495.000
	Realisasi		2 Lap	4 Lap	34.004.255	222.043.648
	%		100	100	71,32	91,94
5.	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial dan budaya</b>	Persentase Meningkatnya Ketahanan Ekonomi,Sosial Budaya				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	124.893.500	591.050.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	115.185.035	450.532.562
	%		100	100	92,22	76,22
	<b>Kegiatan :</b> <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya</b>	<i>Output :</i> Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya <i>Outcome :</i> Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi,sosial dan budaya				
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	124.893.500	591.050.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	115.185.035	450.532.562
	%		100	100	92,22	76,22
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1.Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasi kegiatan P4GN				
	Anggaran		-	100 Orang	69.855.000	75.800.000
	Realisasi		-	100 Orang	59.282.165	43.500.000
	%		-	100	84,86	57,38
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan pelaksanaan FKUB				
	Anggaran		1 Dok	100	129.540.800	429.000.000

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Orang		
	Realisasi		1 Dok	90 Orang	110.904.894	361.564.792
	%		100	75	85,61	84,28
	3.Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan tim PAKEM				
	Anggaran		1 Dok	1 Lap	24.938.500	86.250.000
	Realisasi		1 Dok	1 Lap	21.996.350	45.467.770
	%		100	100	88,20	52,71
6.	<b>Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik</b>	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat				
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	800.498.900	1.224.715.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	790.987.321	999.072.115
	%		100	100	98,81	81,57
	<b>Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</b>	<i>Output :</i> Meningkatnya pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah <i>Outcome :</i> Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial				
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	802.200.000	1.224.715.000

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	791.513.177	999.072.115
	%		100	100	98,66	81,57
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang melakukan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah				
	Anggaran		3 Lap	75 Orang	63.900.000	194.970.000
	Realisasi		3 Lap	57 Orang	63.900.000	122.943.454
	%		100	76	100	63,05
	2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah				
	Anggaran		-	4 lap	0	161.995.000
	Realisasi		-	3 lap	0	112.054.192
	%		-	75	0	69,14
	3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		1 Dok	1 Dok	738.300.000	867.750.000
	Realisasi		1 Dok	1 Dok	727.613.177	764.074.469
	%		100	100	98,55	88,05

## 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.593.700,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.233.200,00 atau setara dengan 37,50 %. *Output* kegiatan adalah Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran secara keseluruhan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

(1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.493.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.283.400,00 atau setara dengan 91,57 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

(2) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.937.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.541.800,00 atau setara dengan 79,59 %. Secara fisik kegiatan ini sudah dilaksanakan dan realisasi sudah 100%, namun adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban belanja kegiatan yang seharusnya ada rekening kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD namun pertanggungjawaban

belanja tersebut di SPJ nya masuk di sub kegiatan belanja penyediaan barang cetak dan penggandaan.. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan. Secara fisik kegiatan ini sudah dilaksanakan dan realisasi sudah 100%, namun adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban belanja kegiatan yang seharusnya ada rekening kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD namun pertanggungjawaban belanja tersebut di SPJ nya masuk di sub kegiatan belanja penyediaan barang cetak dan penggandaan dan belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (ATK dan kertas cover)

- (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.987.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau setara dengan 0 %. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.
- (4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.996.700,00 dan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau setara dengan 0 %. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan. Secara fisik kegiatan ini sudah dilaksanakan dan realisasi sudah 100%, namun adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban belanja kegiatan yang seharusnya ada rekening kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD namun pertanggungjawaban belanja tersebut di SPJ nya masuk di sub kegiatan belanja penyediaan barang cetak dan penggandaan dan belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (ATK dan kertas cover).
- (5) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.539.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.408.000 atau setara dengan 39,77 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan dan

sesuai dengan peruntukannya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan. Secara fisik kegiatan ini sudah dilaksanakan, namun terkait penyerapan realisasi anggaran masih rendah dikarenakan honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp. 1.800.000,00 tidak cairkan.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.928.482.860,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.467.007.081,00 atau setara dengan 88,25 %. *Output* kegiatan adalah Dokumen Keuangan Perangkat Daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen sesuai peraturan. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.462.119.781,00 dan realisasi sebesar Rp. 3.923.482.860,00 atau setara dengan 88,24 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.954.000,00 atau setara dengan 97,7 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (3) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Akhir Tahun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.933.300,00 atau setara dengan 97,7 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 140.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 82.966.221,00 atau setara dengan 59,05 %. *Output* kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen administrasi umum perangkat daerah. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya serta Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tuisi baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.
- (1). Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 atau setara dengan 95,23 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atributnya telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.
- (2). Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tuisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 130.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 72.966.221,00 atau setara dengan 56,12 %. Adapun faktor pendorong

capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan telah dilakukan seluruhnya sesuai dengan ketentuan perhitungan yang telah ditetapkan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah Kurangnya lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tupoksi dari Badan Kesbangpol. Secara fisik kegiatan ini sudah dilaksanakan, namun demikian untuk pelaksanaan triwulan keempat kegiatan diklat ini tidak dapat terealisasi dengan optimal disebabkan penyelenggara diklat yang dianggarkan oleh pemerintah dalam hal ini BPSDM Kemendagri sudah penuh atau tidak ada kuota peserta lagi. Bilamana mau mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh penyelenggara diklat swasta kebanyakan akreditasinya kurang bagus. Dengan pertimbangan kondisi terkait, pelaksanaan kegiatan ini terpaksa tidak dilaksanakan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.573.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 342.218.168,00 atau setara dengan 94,12 %. *Output* kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen administrasi umum perangkat daerah. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

(1). Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.000.000,00 atau setara dengan 100 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran belanja alat-alat telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran sebesar 100%. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.

- (2). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.994.800,00 dan realisasi sebesar Rp. 49.645.800,00 atau setara dengan 99,30 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran belanja alat-alat telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.
- (3). Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.901.500,00 atau setara dengan 70,02 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.
- (4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 69.211.400,00 dan realisasi sebesar Rp. 69.037.714,00 atau setara dengan 99,74%. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak dan keperluan makan dan minum pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.
- (5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 18.458.800,00 atau setara dengan 69,40 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pelaksanaan Barang Cetak dan Penggandaan telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.
- (6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.367.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 190.874.354,00 atau setara dengan 95,26 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pelaksanaan belanja

perjalanan dinas telah dilaksanakan sesuai dengan keperluan dan tujuan perjalanan dinas. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 416.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 369.000.000,00 atau setara dengan 88,64 %. *Output* kegiatan adalah Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur. *Outcome* kegiatan Jenis Barang Milik Daerah. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

(1). Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 416.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 369.000.000,00 atau setara dengan 88,64 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 158.499.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 148.062.169,00 atau setara dengan 93,41 %. *Output* kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta pelayanan jasa pelayanan umum kantor baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan

peruntukannya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan serta beberapa sub kegiatan yang tidak di anggarkan dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan.

(1). Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.500.000,00 atau setara dengan 100 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Penyediaan jasa surat menyurat telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

(2) Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 45.562.769,00 atau setara dengan 81,36 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Penyediaan untuk jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

(3) Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.999.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 99.999.400,00 atau setara dengan 99,99 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk Penyediaan gaji pegawai kontrak/honorer pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung telah terserap sepenuhnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

g. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 189.505.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 185.519.920,00 atau setara dengan 97,89 %. *Output* kegiatan adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur. *Outcome* kegiatan adalah barang milik daerah dalam kondisi baik. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk sub kegiatan penyediaan jasa

pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional baik secara realisasi anggaran dan fisik seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan serta beberapa sub kegiatan yang tidak di anggarkan dikarenakan keterbatasan pagu anggaran yang diberikan.

(1) Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 58.732.750,00 atau setara dengan 95,89 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

(2) Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 16.645.000,00 atau setara dengan 99,99 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

(3) Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.255.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 40.160.000,00 atau setara dengan 99,76 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang ada pada Badan Kesbangpol telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

(4) Sub Kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 69.982.170,00 atau setara dengan 99,97 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah serapan anggaran untuk pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang ada pada Badan Kesbangpol telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan.

## **2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Kegiatan Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa dan pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.294.411.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.188.686.101,00 atau setara dengan 91,83 % *Output* kegiatan adalah Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan. *Outcome* kegiatan adalah Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh sub kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah Terbatasnya sumber daya aparatur pengelola kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung.

(1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa dan pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.185.303.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.105.186.101,00 atau setara dengan 93,24 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat dan pelajar dalam kegiatan paskibraka dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya.

Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah Kurang sumber daya manusia yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

- (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa dan pembauran kebangsaan ,Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109.108.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 83.500.000,00 atau setara dengan 76,52 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan yang melibatkan kelompok masyarakat telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah Kurang sumber daya manusia yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Secara keseluruhan dalam rangka penguatan dan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan dapat dilaksanakan, seperti mengadakan rapat-rapat, menerima kunjungan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berpartisipasi dalam kegiatan karnaval Kementerian Pariwisata dan Ekraf di desa Terong, dan untuk pembiayaannya disesuaikan dengan kebutuhan.

### **3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.138.045.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 23.828.769.350,00 atau setara dengan 98,71 % *Output* kegiatan adalah meningkatnya pemahaman politik parpol dan lembaga pendidikan. *Outcome* laporan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh sub kegiatan dan bantuan hibah kepada parpol, KPU, Bawaslu, Kodim dan Polres telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di

tentukan sebelumnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (1) Sub kegiatan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.836.550.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.770.869.350,00 atau setara dengan 99,72 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan Kegiatan Simpoldagri dan bantuan hibah kepada parpol, KPU, Bawaslu Kodim dan Polres telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) Sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 57.9000.000,00 atau setara dengan 96,5 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan Bimtek administrasi bantuan keuangan parpol dan verifikasi bantuan keuangan parpol telah dilaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan sebelumnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan
- (3) Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan parpol, pemilihan umum/kepala daerah serta pemantauan situasi politik dengan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.495.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 222.043.648,00 atau setara dengan 91,94 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan pemantauan perkembangan politik di daerah telah dilaksanakan dengan melakukan monitoring persiapan pemilu di beberapa wilayah di Kabupaten

Belitung. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

#### **4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Seni dan Budaya**

Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 591.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 450.532.562,00 atau setara dengan 76,22 % *Output* kegiatan adalah meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, budaya. *Outcome* laporan hasil Perumusan kebijakan teknis dan pematapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Adapun pendorong faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh sub kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Kegiatan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat (PAKEM) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

(1) Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,FKUB dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp.43.500.000,00 atau setara dengan 57,38 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan. Pada prinsipnya kegiatan dalam rangka mendukung pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dapat dilaksanakan seperti penyediaan urine test beserta kelengkapannya, melakukan test urine pada pengunjung taman hiburan dalam rangka mendukung keamanan, ketertiban menjelang Pilkada tahun 2024, sedangkan untuk penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

- (2) Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 429.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 361.564.792,00 atau setara dengan 84,28 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.
- (3) Sub kegiatan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 45.467.770,00 atau setara dengan 52,71 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh Kegiatan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat (PAKEM) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah dibuat sebelumnya. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan. Kegiatan fasilitasi Pengawasan Aliran Keagamaan dan Kepercayaan di Masyarakat (PAKEM), baik rapat-rapat, pelaksanaan pengawasan secara tertutup maupun terbuka dengan melakukan kunjungan/silaturahmi serta menghadirkan untuk ikut rapat berkaitan dengan permasalahan tertentu dapat dilakukan terutama terkait dalam rangka mendukung dan menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan di masyarakat menjelang Pilkada 2024. Namun untuk pelaksanaan kaji banding (*benchmarking*) kunjungan daerah lain oleh Tim Koordinasi PAKEM tidak dapat dilakukan dikarenakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan terkait dukungan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Belitung.

## **5. Program Peningkatan Kewaspadaan nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik**

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan Badan Kesbangpol Kabupaten

Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.224.715.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 999.072.115,00 atau setara dengan 81,57 %. *Output* kegiatan adalah Meningkatnya pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah. *Outcome* laporan hasil Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Adapun pendorong faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh sub kegiatan Forum Kewaspadaan Dini di Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini serta Tim Penanganan Konflik Sosial serta Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah dilaksanakan seluruhnya baik dari segi pelaksanaan kegiatan atau pun realisasi anggarann yang dilaksanakan.

(1) Sub kegiatan pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.970.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 122.943.454,00 atau setara dengan 63,05%. Penyebab realisasi 63,05% adalah adanya rekening belanja kegiatan yang belum dilakukan pertanggungjawabannya dan adanya penyesuaian atau pengurangan honorarium bulanan tim yang disesuaikan dengan Peraturan Kementrian Keuangan Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan Forum Kewaspadaan Dini di Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini telah dilaksanakan yang didukung oleh seluruh tim yang memberikan laporan serta situasi tentang ipoleksosbudhankam. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

(2) Sub kegiatan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.995.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 122.054.192,00 atau setara dengan 69,14 %. Penyebab realisasi 69,14% adalah adanya rekening belanja kegiatan yang belum dilakukan pertanggungjawabannya dan adanya penyesuaian atau pengurangan honorarium bulanan tim yang disesuaikan dengan Peraturan

Kementrian Keuangan. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh kegiatan Tim Kewaspadaan Dini serta Tim Penganangan Konflik Sosial telah dilaksanakan yang didukung oleh seluruh tim yang memberikan laporan serta situasi tentang ipoleksosbudhankam. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

- (3) Sub kegiatan pelaksanaan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 867.750.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 764.074.469,00 atau setara dengan 88,05 %. Adapun faktor pendorong capaian kinerja kegiatan adalah pelaksanaan seluruh Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah dilaksanakan dengan kerjasama antara Tim Forkopimda dan Sekretariat Forkopimda. Adapun faktor penghambat realisasi anggaran kegiatan adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
  - a. Kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Keuangan Partai Politik;



- b. Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;



c. Pemberian Bantuan Hibah kepada partai Politik



d. Monitoring Kampanye



2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan  
a. Kegiatan Paskibraka Tahun 2024



b. Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)



c. Kegiatan Pawai



3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
  - a. Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)



- b. Kegiatan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan di Masyarakat (PAKEM)



4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Forkopimda)



## **BAB IV PENUTUP**

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja tahun 2024 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama ini, melalui program, kegiatan, dan kebijaksanaan meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan. Dari Lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan dan jika melihat Rentang kategori pencapaian kinerja maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung pada Tahun 2024 sudah berusaha maksimal dalam melaksanakan kegiatan. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan

### **4.1. Kesimpulan Kinerja Tahun 2024**

Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian sasaran strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh kesimpulan dari hasil evaluasi kinerja secara mandiri menunjukkan bahwa sasaran yang telah mencapai targetnya sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
2. Fasilitasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum
4. Fasilitasi Kegiatan Badan Narkotika
5. Fasilitasi Bantuan Keuangan dan Bimtek
6. Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
7. Fasilitasi Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
8. Fasilitasi Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka)

Hasil laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, indikator Persentase Meningkatnya Penanganan Konflik Tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Persentase Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Kebangsaan Tahun 2024 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini di karenakan penyelesaian permasalahan konflik telah

di fasilitasi dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yang bekerjasama dengan OPD atau pun instansi vertikal terkait sesuai data dan pelaporan penanganan konflik pada Tahun 2024 dapat di selesaikan di mulai dari tingkat yang paling rendah.

2. Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar Rp 31.289.110.535 atau sebesar 96,40% dari total anggaran Rp 32.430.236.460.

#### **4.2. Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025**

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

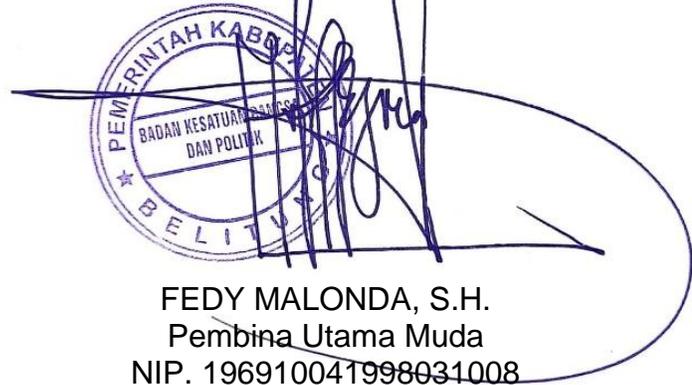
2. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi;
3. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode;
4. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku;
5. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi terutama ke sekolah-sekolah melalui pendidikan, FGD, perlombaan maupun pengkaderan;
6. Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan koordiansi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di Pemerintah Kabupaten Belitung;
7. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan pencapaian sasaran dan pelaksan tugas pokok dan fungsi dibidang Kesatuan Satuan Bangsa dan Politik;
8. Penataan basis data dan informasi baik ORMAS/LSM, Partai Politik, serta data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menunjang pelaksanaan kerja;

9. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam meningkatkan profesionalisme;
10. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, terutama gedung kantor dan peralatan gedung kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik; dan
11. Koordinasi yang jelas dari semua perangkat OPD.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung sebagai realisasi program kerja tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah disusun.

Tanjungpandan, Januari 2025

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BELITUNG**



The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Belitung government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG' around the perimeter and 'BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK' in the center. A blue ink signature is written over the stamp. Below the stamp, the name and title of the official are printed.

FEDY MALONDA, S.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196910041998031008



# LAMPIRAN

**LAMPIRAN I:**  
**PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN**

Sasprog/Saskeg		Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Program								
				Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Naik/ (turun)	Capaian 2023	Capaian 2024	Naik/ (turun)	Target 2025	% Realisasi thd target 2025
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya FAsilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	1.1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	80.41	100	naik	100	100	tetap	100	100
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	88.8	85.6	turun	-	100	naik	75	75
		1.3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	89.19	100	naik	100	100	tetap	100	100
		1.4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	88.87	100	naik	100	100	tetap	100	100
2	Terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.1	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	92.75	100	naik	100	100	tetap	100	100
3	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	3.1	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	%	89.56	99.87	naik	100	100	tetap	100	100

4	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	4.1	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah ketahanan ekonomi, social dan budaya	%	90.71	81.85	turun	100	100	tetap	100	100
5	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.1	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	%	99.25	92.87	turun	100	100	tetap	100	100

LAMPIRAN II :  
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sasprog/Saskeg	Indikator Kinerja Program (IKP)/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/Kegiatan				Anggaran			SDM				
		Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Terlaksananya FAsilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	1.1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	%	100	100	100	5.210.764.860	4.600.006.759	91.83	-	-	-
		1.2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	75	85.6	75				-	-	-
		1.3	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	100				-	-	-
		1.4	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100				-	-	-
2	Terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.1	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	1.2.94.411.300	1.188.686.101	91.83	-	-	-
3	Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga	3.1	Persentase Parpol dan Lembaga Pendidikan Politik dan	%	100	100	100	24.138.045.300	24.050.812.998	96.06	-	-	-

	Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Pengembangan Etika serta Budaya Politik										
4	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	4.1	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah ketahanan ekonomi, social dan budaya	%	100	100	100	591.050.000	450.532.562	76.22	-	-	-
5	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	5.1	Persentase Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat	%	100	100	100	1.224.715.000	999.072.115	81.57	-	-	-
<b>Total</b>								32.458.986460	31.289.110.535	96.40	-	-	-

**LAMPIRAN III**  
**CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN BULAN DESEMBER 2024**  
**BADAN KESTUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG**

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Anggaran Pergeseran	Realisasi	Lebih Kurang	keuangan %	Fisik %
1	2	5	6	7	8	9	10
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.052.783.360,00</b>	<b>5.627.014.860,00</b>				
	<b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13.953.700,00</b>	<b>13.953.700,00</b>				
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.493.500,00	2.493.500,00	2.283.400,00	210.100,00	91,57%	100,00%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.937.000,00	1.937.000,00	1.541.800,00	395.200,00	79,60%	100,00%
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.987.000,00	2.987.000,00	0,00	2.987.000,00	0,00%	100,00%
	4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.996.700,00	2.996.700,00	0,00	2.996.700,00	0,00%	100,00%
	5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.539.500,00	3.539.500,00	1.408.000,00	2.131.500,00	39,78%	100,00%
	<b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.928.482.860,00</b>	<b>3.928.482.860,00</b>				
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.923.482.860,00	3.923.482.860,00	3.462.119.781,00	461.363.079,00	88,24%	100,00%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.000.000,00	2.000.000,00	1.954.000,00	46.000,00	97,70%	100,00%
	3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000,00	3.000.000,00	2.933.300,00	66.700,00	97,78%	100,00%
	<b>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>90.500.000,00</b>	<b>140.500.000,00</b>				
	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	10.000.000,00	500.000,00	95,24%	100,00%
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	80.000.000,00	130.000.000,00	72.966.221,00	57.033.779,00	56,13%	100,00%
	<b>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>271.842.200,00</b>	<b>363.573.700,00</b>				
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.994.800,00	49.994.800,00	49.645.800,00	349.000,00	99,30%	100,00%
	3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.000.000,00	7.000.000,00	4.901.500,00	2.098.500,00	70,02%	100,00%
	4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.479.900,00	69.211.400,00	69.037.714,00	173.686,00	99,75%	100,00%
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	18.458.800,00	6.541.200,00	73,84%	100,00%
	6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000,00	7.000.000,00	4.300.000,00	2.700.000,00	61,43%	100,00%
	7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.367.500,00	200.367.500,00	190.874.354,00	9.493.146,00	95,26%	100,00%
	<b>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>416.250.000,00</b>	<b>416.250.000,00</b>	369.000.000,00	47.250.000,00	88,65%	100,00%
	<b>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>158.499.600,00</b>	<b>158.499.600,00</b>				
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00%	100,00%
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.000.000,00	56.000.000,00	45.562.769,00	10.437.231,00	81,36%	100,00%
	3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	99.999.600,00	99.999.600,00	99.999.400,00	200,00	100,00%	100,00%
	<b>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>173.255.000,00</b>	<b>189.505.000,00</b>				
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000,00	61.250.000,00	58.732.750,00	2.517.250,00	95,89%	100,00%

	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Peizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.000.000,00	18.000.000,00	16.645.000,00	1.355.000,00	92,47%	100,00%
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.255.000,00	40.255.000,00	40.160.000,00	95.000,00	99,76%	100,00%
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	69.982.170,00	17.830,00	99,97%	100,00%
	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>994.411.300,00</b>	<b>1.290.411.300,00</b>				
	<b>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>994.411.300,00</b>	<b>1.290.411.300,00</b>				
2	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	885.303.300,00	1.181.303.300,00	1.105.186.101,00	76.117.199,00	93,56%	100,00%
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	109.108.000,00	109.108.000,00	83.500.000,00	25.608.000,00	76,53%	100,00%
	<b>PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>24.002.140.300,00</b>	<b>24.113.295.300,00</b>				
	<b>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>24.002.140.300,00</b>	<b>24.113.295.300,00</b>				
3	1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	23.763.140.300,00	23.811.800.300,00	23.770.869.350,00	40.930.950,00	99,83%	100,00%
	2. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	57.900.000,00	2.100.000,00	96,50%	100,00%
	3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	179.000.000,00	241.495.000,00	222.043.648,00	19.451.352,00	91,95%	100,00%
	<b>PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>	<b>570.750.000,00</b>	<b>591.050.000,00</b>				
	<b>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>570.750.000,00</b>	<b>591.050.000,00</b>				
4	1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	75.800.000,00	75.800.000,00	43.500.000,00	32.300.000,00	57,39%	100,00%

	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	408.700.000,00	429.000.000,00	361.564.792,00	67.435.208,00	84,28%	100,00%
	3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	86.250.000,00	86.250.000,00	45.467.770,00	40.782.230,00	52,72%	100,00%
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>825.815.000,00</b>	<b>1.224.715.000,00</b>				
	<b>1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>825.815.000,00</b>	<b>1.224.715.000,00</b>				
5	1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	194.970.000,00	194.970.000,00	122.943.454,00	72.026.546,00	63,06%	100,00%
	2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	141.995.000,00	161.995.000,00	112.054.192,00	49.940.808,00	69,17%	100,00%
	3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	488.850.000,00	867.750.000,00	764.074.469,00	103.675.531,00	88,05%	100,00%

LAMPIRAN IV  
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN TAHUN 2023 DAN 2024

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan keuangan sesuai ketentuan 2. Indeks Profesionalitas ASN perangkat daerah 3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah 4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				
	Anggaran		-	100	4.315.314.060	5.210.764.860
	Realisasi		-	92,8	3.535.324.794	4.600.006.759
	%		-	100	89,54	91,83
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output : Dokumen hasil perencanaan ,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Outcome : Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan				
	Anggaran		-	10 Dok	0	13.953.700
	Realisasi		-	9 Dok	0	5.233.200
	%		-	100	0	37,50
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
	Anggaran		-	3 Dok	0	2.493.500
	Realisasi		-	3 Dok	0	2.283.400
	%		-	100	0	91,57

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD				
	Anggaran		-	1 Dok	0	1.937.000
	Realisasi		-	1 Dok	0	1.541.800
	%		-	100	0	79,59
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD				
	Anggaran		-	1 Dok	0	2.987.000
	Realisasi		-	1 Dok	0	0
	%		-	100	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
	Anggaran		-	1 Dok	0	2.996.700
	Realisasi		-	1 Dok	0	0
	%		-	100	0	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				
	Anggaran		-	3 Lap	0	3.539.500
	Realisasi		-	3 Lap	0	1.408.000
	%		-	0	0	39,77
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output : Dokumen keuangan perangkat daerah Outcome : Terpenuhinya dokumen sesuai peraturan				
	Anggaran		22 OB	3 Dok	3.930.433.360	3.928.482.860
	Realisasi		22 OB	3 Dok	3.160.557.039	3.467.007.081
	%		100	100	80,41	88,25
	Sub Kegiatan :	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN					
	Anggaran		22 OB	21 OB	3.930.433.360	3.923.482.860
	Realisasi		22 OB	21 OB	3.160.557.039	3.462.119.781
	%		100	100	80,41	88,24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun					
	Anggaran		22 OB	1 Lap	0	2.000.000
	Realisasi		22 OB	1 Lap	0	1.954.000
	%		100	100	0	97,7
	Penyusunan pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					
	Anggaran		22 OB	2 Dok	0	3.000.000
	Realisasi		22 OB	2 Dok	0	2.933.300
	%		100	100	0	97,7
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Output : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Outcome : Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah				
	Anggaran		-	100	0	140.500.000
	Realisasi		-	100	0	82.966.221
	%		-	100	0	59,05
	Sub kegiatan : 1.Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya				
	Anggaran		-	1 Paket	0	10.500.000
	Realisasi		-	1 Paket	0	10.000.000
	%		-	100	0	95,23

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	2.Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tusi	jumlah pegawai yang mengikuti tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				
	Anggaran		-	15 Orang	0	130.000.000
	Realisasi		-	7 Orang	0	72.966.221
	%		-	46,67	0	56,12
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Outcome : terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah				
	Anggaran		100	100	193.750.700	363.573.300
	Realisasi		100	100	181.845.513	342.218.168
	%		100	100	93,85	94,12
	Sub Kegiatan : 1.Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				
	Anggaran		1 Paket	1 Paket	2.000.000	5.000.000
	Realisasi		1 Paket	1 Paket	2.000.000	5.000.000
	%		100	100	100	100
	2.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				
	Anggaran		2 Paket	2 Paket	40.712.800	49.994.800
	Realisasi		2 Paket	2 Paket	36.485.000	49.645.800
	%		100	100	89,62	99,30
	3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				
	Anggaran		-	1 Paket	0	7.000.000
	Realisasi		-	1 Paket	0	4.901.500
	%		-	100	0	70,02

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4.Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				
	Anggaran		2 Paket	2 Paket	38.826.500	69.211.400
	Realisasi		2 Paket	2 Paket	38.695.374	69.037.714
	%		100	100	99,66	99,74
	5.Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				
	Anggaran		1 Paket	1 Paket	22.211.400	25.000.000
	Realisasi		1 Paket	1 Paket	15.415.000	18.458.800
	%		100	100	69,40	73,83
	6.Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan				
	Anggaran		-	1 Dok	0	7.000.000
	Realisasi		-	1 Dok	0	4.300.000
	%		-	100	0	61,42
	7.Penyelenggaraan Rakor dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyeleggaraan rakor dan Konsultasi SKPD				
	Anggaran		12 Lap	12 Lap	90.000.000	200.367.500
	Realisasi		12 Lap	12 Lap	89.250.139	190.874.354
	%		100	100	99,17	95,26
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Outcome : Jenis Barang Milik Daerah				
	Anggaran		-	2 Jenis	-	416.250.000
	Realisasi		-	1 Jenis	-	369.000.000
	%		-	100	-	88,64
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		-	2 Jenis	-	416.250.000
	Realisasi		-	1 Jenis	-	369.000.000
	%		-	100	-	88,64
	Kegiatan : Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah Outcome : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran				
	Anggaran		12 Lap	100	155.000.000	158.499.600
	Realisasi		12 Lap	100	136.234.642	148.062.169
	%		100	100	87,89	93,41
	Sub Kegiatan : 1.Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat				
	Anggaran		-	12 Lap	0	2.500.000
	Realisasi		-	12 Lap	0	2.500.000
	%		-	100	0	100
	2.Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan				
	Anggaran		12 Lap	12 Lap	56.000.000	56.000.000
	Realisasi		12 Lap	12 Lap	37.234.642	45.562.769
	%		100	100	66,49	81,36
	3.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				
	Anggaran		12 Lap	12 Lap	99.000.000	999.999.600
	Realisasi		12 Lap	12 Lap	99.000.000	999.999.400
	%		100	100	100	99,99
	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Ouput :Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Outcome : Barang milik daerah dalam kondisi baik				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		11 Unit	4 Jenis	36.130.000	189.505.000
	Realisasi		11 Unit	4 Jenis	28.343.800	185.519.920
	%		100	100	78,45	97,89
	Sub Kegiatan :					
	1.Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan					
	Anggaran		11 Unit	10 Unit	72.750.000	61.250.000
	Realisasi		11 Unit	10 Unit	64.658.790	58.732.750
	%		100	100	88,87	95,89
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajak perorangan dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaran perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				
	Anggaran		-	2 Unit	-	18.000.000
	Realisasi		-	1 Unit	-	16.645.000
	%		-	100	-	99,99
	3. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				
	Anggaran		-	49 Unit	0	40.255.000
	Realisasi		-	12 Unit	0	40.160.000
	%		-	92,31	0	99,76
	4.Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				
	Anggaran		-	4 Unit	0	70.000.000
	Realisasi		-	4 Unit	0	69.982.170
	%		-	100	0	99,97

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan				
	Anggaran		3 Dok		759.162.400	
	Realisasi		3 Dok		704.144.903	
	%		100		92,75	
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Output : Meningkatnya kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan Outcome : Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan				
	Anggaran		1 Dok	3 Dok	759.162.400	1.294.411.300
	Realisasi		1 Dok	3 Dok	704.144.903	1.188.686.101
	%		100	100	92,75	91,83
	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela Negara,karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela Negara,karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan				
	Anggaran		-	75 Orang	0	1.185.303.300
	Realisasi		-	75 Orang	0	1.105.186.101
	%		-	100	0	93,24
	2. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela Negara,karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan,bela Negara,karakter bangsa, pembauran kebangsaan,bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		40 Orang	300 Orang	759.162.400	109.108.000
	Realisasi		40 Orang	300 Orang	704.144.903	83.500.000
	%		100	100	92,75	76,52
3.	Program Peningkatan Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Parpol dan lembaga pendidikan politik yang mendapatkan pendidikan politik				
	Anggaran		3 Dok	100	13.527.721.350	24.138.045.300
	Realisasi		3 Dok	100	13.512.473.676	23.828.769.350
	%		100	100	99,88	98,71
	Kegiatan : Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan parpol, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan Situasi Politik	Ouput : Meningkatnya pemahaman politik parpol dan lembaga pendidikan Outcome : Laporan Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan,perwakilan dan parpol, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan Situasi Politik				
	Anggaran		3 Dok	100	13.527.721.350	24.138.045.300
	Realisasi		3 Dok	100	13.512.473.676	23.828.769.350
	%		100	100	99,88	98,71
	Sub Kegiatan :	Jumlah kebijakan di bidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1.penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendidikan politik,etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik	demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik				
	Anggaran		13 Dok	12 Dok	13.420.087.400	23.836.550.300
	Realisasi		13 Dok	12 Dok	13.420.087.400	23.770.869.350
	%		100	100	100	99,72
	2.pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik				
	Anggaran		50 Orang	210 Orang	59.958.250	60.000.000
	Realisasi		50 Orang	210 Orang	58.382.021	57.900.000
	%		100	100	97,37	96,5
	3.Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan	Jumlah laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi,fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik,pemilihan umum/pemilihan umum				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepada daerah serta pemantauan situasi politik	kepada daerah serta pemantauan situasi politik				
	Anggaran		2 Lap	4 Lap	47.675.700	241.495.000
	Realisasi		2 Lap	4 Lap	34.004.255	222.043.648
	%		100	100	71,32	91,94
5.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan budaya	Persentase Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya				
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	124.893.500	591.050.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	115.185.035	450.532.562
	%		100	100	92,22	76,22
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Output : Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya Outcome : Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	124.893.500	591.050.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	115.185.035	450.532.562
	%		100	100	92,22	76,22
	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terfasilitasi kegiatan P4GN				
	Anggaran		-	100 Orang	69.855.000	75.800.000

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Realisasi		-	100 Orang	59.282.165	43.500.000
	%		-	100	84,86	57,38
	2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan pelaksanaan FKUB				
	Anggaran		1 Dok	100 Orang	129.540.800	429.000.000
	Realisasi		1 Dok	90 Orang	110.904.894	361.564.792
	%		100	75	85,61	84,28
	3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, FKUB dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan tim PAKEM				
	Anggaran		1 Dok	1 Lap	24.938.500	86.250.000
	Realisasi		1 Dok	1 Lap	21.996.350	45.467.770
	%		100	100	88,20	52,71
6.	Program peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat				
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	800.498.900	1.224.715.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	790.987.321	999.072.115
	%		100	100	98,81	81,57

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Output : Meningkatnya pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan penanganan konflik sosial di daerah Outcome : Laporan hasil perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial				
	Anggaran		3 Dok	3 Dok	802.200.000	1.224.715.000
	Realisasi		3 Dok	3 Dok	791.513.177	999.072.115
	%		100	100	98,66	81,57
	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara,fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di daerah	Jumlah orang yang melakukan koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara,fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di daerah				
	Anggaran		3 Lap	75 Orang	63.900.000	194.970.000
	Realisasi		3 Lap	57 Orang	63.900.000	122.943.454
	%		100	76	100	63,05
	2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara,fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di daerah	Jumlah laporan hasil monitoring,evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, pemantauan orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan perbatasan antar Negara,fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di daerah				

No	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output/Outcome	Kinerja		Keuangan (Rupiah)	
			2023	2024	Tahun 2023	Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Anggaran		-	4 lap	0	161.995.000
	Realisasi		-	3 lap	0	112.054.192
	%		-	75	0	69,14
	3.Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota				
	Anggaran		1 Dok	1 Dok	738.300.000	867.750.000
	Realisasi		1 Dok	1 Dok	727.613.177	764.074.469
	%		100	100	98,55	88,05

## LAMPIRAN V IKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG

### 1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

#### Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Tugas : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati Belitung dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
- Fungsi : 1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Belitung;
6. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	<b>Terwujudnya Ketentraman, Kemanan dan Stabilitas Politik yang kondusif</b>	Presentase Penanganan konflik	Jumlah konflik yang ditangani / jumlah konflik yang ada pada tahun n x 100 %	Laporan Penanganan Konflik
1.1	Meningkatnya Ketentraman, Keamanan dan Stabilitas Politik	Presentase penanganan konflik	Jumlah konflik yang ditangani / jumlah konflik yang ada pada tahun n x 100 %	Laporan Penanganan Konflik

**LAMPIRAN VI**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEDY MALONDA, SH

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : MIKRON ANTARIKSA

Jabatan : Pj. BUPATI BELITUNG

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua,  
Pj. BUPATI BELITUNG  
MIKRON ANTARIKSA

Pihak Kesatu,  
KEPALA BADAN  
FEDY MALONDA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691004 199803 1 008

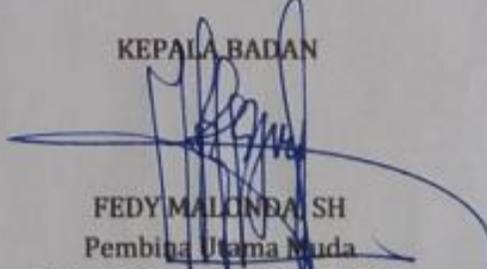
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN BELITUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Ketentraman, Keamanan dan Stabilitas Politik yang Kondusif	Persentase Penanganan konflik	100
1.1	Meningkatnya Ketentraman dan Keamanan	Persentase Penanganan konflik	100

Program	Anggaran	Ket.
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.210.764.860	P-APBD
2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 1.294.411.300	P-APBD
3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 24.138.045.300	P-APBD
5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp. 591.050.000	P-APBD
6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.224.715.000	P-APBD
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp 32.458.986.460</b>	

Tanjungpandan, 14 Oktober 2024

  
 Pj. BUPATI BELITUNG,  
 MIKRON ANTARIKSA

KEPALA BADAN  
  
 FEDY MALINDA SH  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19691004 199803 1 008